

BAB I

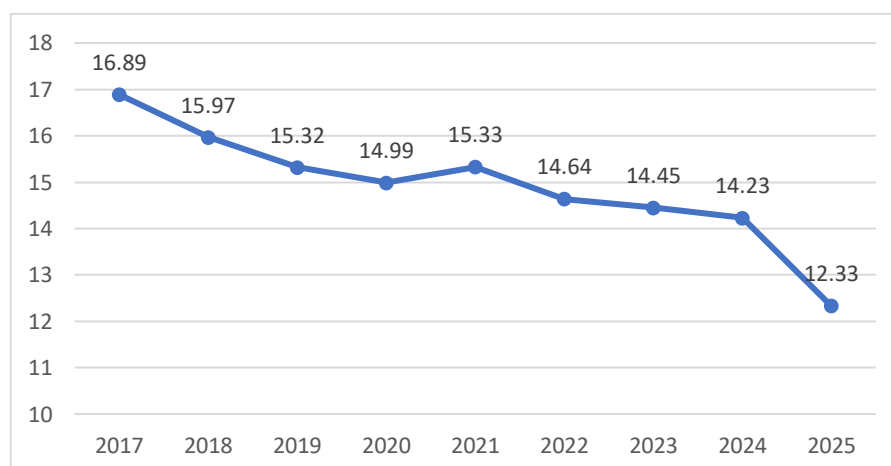
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, tingkat kemiskinan sering dijadikan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, sedangkan tingginya tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan, meskipun kecepatannya berbeda antarwilayah. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan menunjukkan penurunan yang relatif lebih cepat karena didukung oleh struktur ekonomi yang lebih beragam, industrialisasi, serta akses pendidikan dan lapangan kerja yang lebih luas. Sebaliknya, beberapa provinsi di luar Jawa masih menghadapi tantangan yang lebih kompleks, termasuk keterbatasan infrastruktur, dominasi sektor informal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun beberapa provinsi lain di Sumatera. Meskipun berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial menunjukkan perbaikan, Aceh masih termasuk wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di kawasan Sumatera. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh memang mengalami tren penurunan selama periode 2017-2025, namun penurunannya berlangsung relatif lambat dan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu mengurangi kemiskinan secara optimal.



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2017-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, (2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2017 sampai dengan 2025 cenderung mengalami penurunan, meskipun lajunya relatif lambat. Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, tingkat kemiskinan Aceh menurun dari 16,89 persen pada tahun 2017 menjadi 12,33 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial, namun lajunya relatif lambat.

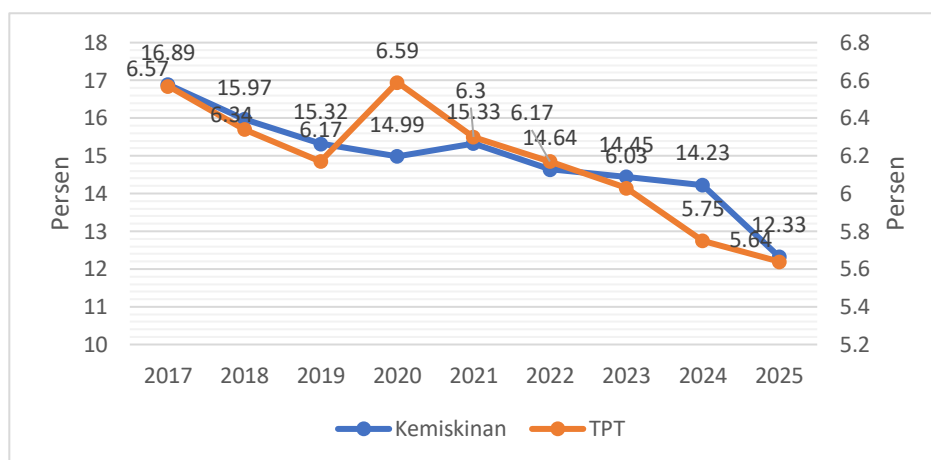
Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia meningkat, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan dan merata di seluruh kabupaten/kota.

Aceh masih termasuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, bahkan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif, dan peningkatan indikator kesejahteraan belum sepenuhnya efektif menurunkan kemiskinan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *economic growth* dan *poverty reduction*, yang perlu diteliti lebih lanjut secara empiris.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Semakin tinggi TPT, semakin besar jumlah penduduk yang kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga berpotensi menurunkan daya beli dan meningkatkan risiko kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), pengangguran terbuka menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, yang dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui konsep *Okun's Law* yang dikemukakan oleh Arthur Okun (1962), yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berkaitan dengan penurunan output ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya

pendapatan masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini didukung oleh penelitian Mitsuhiro Kataoka (2019) yang menunjukkan bahwa perbedaan kondisi pasar tenaga kerja antarwilayah di Indonesia memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, TPT memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan karena mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan.



Gambar 1. 2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2017-2025

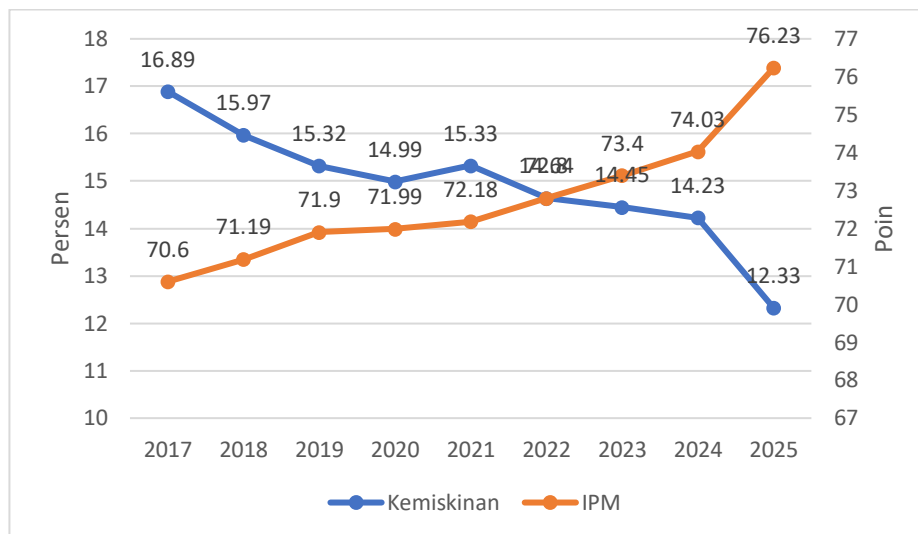
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh selama periode 2017-2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung menurun. TPT tercatat sebesar 6,57 persen pada tahun 2017, kemudian menurun hingga 6,17 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 TPT kembali meningkat menjadi 6,59 persen akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, TPT mulai menurun menjadi 6,30 persen, yang mengindikasikan adanya pemulihan dalam penyerapan tenaga kerja setelah tekanan ekonomi pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan

bahwa sebagian angkatan kerja mulai kembali terserap ke dalam pasar kerja seiring membaiknya aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, penurunan TPT pada tahun 2021 tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh justru meningkat dari 14,99 persen pada tahun 2020 menjadi 15,33 persen pada tahun 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa membaiknya kondisi pengangguran belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas pekerjaan, pendapatan yang belum stabil, serta dampak lanjutan pandemi yang masih memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan TPT tidak selalu secara langsung diikuti oleh penurunan kemiskinan, karena terdapat faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM menggambarkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan sering digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi. Menurut Hasan (2022), IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi IPM maka semakin rendah persentase penduduk miskin. Hal ini karena peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan meningkatkan kapabilitas individu untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.



Gambar 1. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2017-2025

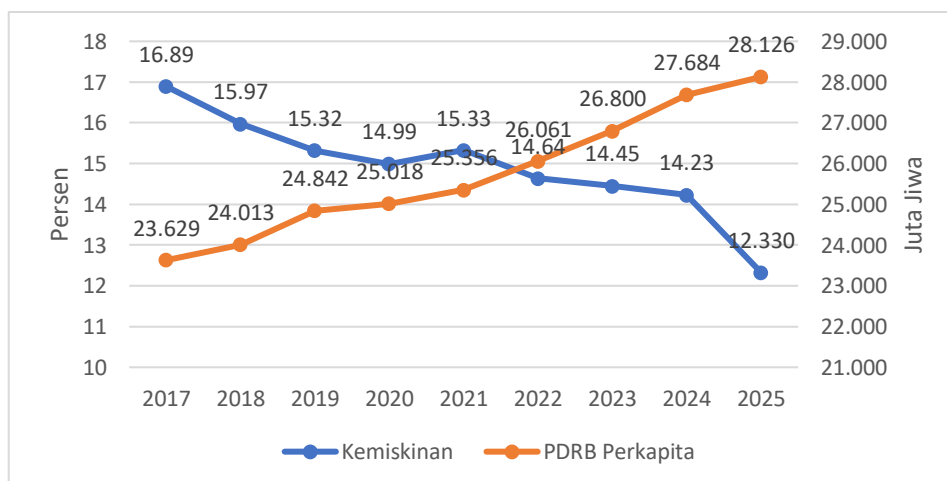
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.3, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh selama periode 2017-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 70,6 pada tahun 2017 menjadi 76,23 pada tahun 2025. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan secara umum mengalami penurunan dari 16,89 persen menjadi 14,23 persen, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, cenderung diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun, hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan tidak selalu berlangsung secara langsung. Pada periode 2020-2021, IPM tetap meningkat dari 71,99 menjadi 72,18, tetapi tingkat kemiskinan justru naik dari 14,99 persen menjadi 15,33 persen. Fenomena ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pemerataan akses ekonomi agar dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lebih optimal.

Selanjutnya, PDRB per kapita menggambarkan nilai rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per penduduk di suatu wilayah dan sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Armanda dan Hasmarini (2024), PDRB per kapita berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan pendapatan. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar per individu, yang secara teoritis dapat menurunkan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif.



Gambar 1. 4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2017-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.4, PDRB per kapita di Provinsi Aceh selama periode 2017-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 23,629 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 28,126 juta rupiah pada tahun 2025. Pada periode

yang sama, tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari 16,89 persen menjadi 14,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah secara umum diikuti oleh membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan pendapatan per kapita berpotensi memperluas kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, hubungan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan tidak selalu berlangsung secara langsung atau linier. Pada periode 2020-2021, PDRB per kapita tetap meningkat dari 25,018 juta rupiah menjadi 25,356 juta rupiah, tetapi tingkat kemiskinan justru naik dari 14,99 persen menjadi 15,33 persen. Fenomena ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan sebagian masyarakat, dan terbatasnya kesempatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita belum tentu langsung menurunkan kemiskinan apabila hasil pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, hubungan antara pembangunan ekonomi dan tingkat kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian R. Bambang Budhijana (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan kualitas pembangunan manusia berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran cenderung meningkatkan kemiskinan. Temuan serupa juga diperoleh oleh Sarah Farida Fitria (2022) yang menunjukkan bahwa PDRB, IPM, dan TPT secara simultan memengaruhi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Dian Prehatin dan Miftakhul Choiri (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak selalu secara signifikan menurunkan kemiskinan apabila tingkat pengangguran masih tinggi dan distribusi pendapatan belum merata. Selain itu, penelitian Dara Angreka Soufyan et al. (2024) di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa PDRB justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengurangi kemiskinan tanpa didukung pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan variabel TPT, IPM, dan PDRB per kapita dalam satu model analisis guna menjelaskan dinamika kemiskinan di Provinsi Aceh.

Fenomena di Provinsi Aceh menunjukkan kondisi yang menarik untuk dikaji. Meskipun berbagai indikator pembangunan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB per kapita cenderung mengalami perbaikan selama periode pengamatan, tingkat kemiskinan masih berada pada level yang relatif tinggi dan penurunannya berlangsung secara lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Aceh”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, dan PDRB per kapita secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, dan PDRB per kapita secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam praktik pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.
- b. Menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara TPT, IPM, PDRB per kapita, dan kemiskinan di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga perencana pembangunan daerah dalam menyusun program peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja produktif.
- c. Menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat dan peneliti lain yang tertarik pada isu pembangunan manusia dan kemiskinan di tingkat regional.